

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELABELAN PRODUK PANGAN KERUPUK SANJAI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

¹Dina Mustika, ¹Suamperi

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: dinaamustikaa@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi landasan hukum untuk upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan tentang pentingnya pencantuman label pada kemasan produk yang masih banyak tidak memenuhi persyaratan pelabelan pada produk pangan kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota. Rumusan masalah yaitu 1) bagaimanakah guna pencatuman label pangan kerupuk sanjai di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota?, 2) apakah kendala pengusaha dalam pencatuman label, 3) bagaimanakah upaya perlindungan hukum dari pencatuman label kerupuk sanjai tidak terdaftar?. Metode digunakan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1) guna pencatuman label produk pangan kerupuk sanjai untuk mengetahui informasi produk, mempermudah mengawasi produk, 2) kendala dalam pencantuman label yaitu kurangnya kesadaran pentingnya pencantuman label, kurangnya informasi, kurangnya ilmu pengetahuan, keterbatasan waktu, pengurusan dokumen, perilaku konsumen, perputaran proses jual beli, kurangnya pembinaan dan pengawasan 3) upaya perlindungan hukum timbul dari pencantuman label tidak terdaftar berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan sementara, perintah menarik produk pangan dari peredaran; pemusnahan; pengenaan denda, pencabutan izin usaha

Kata Kunci: Hukum, Pelabelan, Kerupuk